

## **HAK PENDIDIKAN ANAK DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI LARANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR**

**Rian Rosita**

Universitas Negeri Jakarta

[rianrosita8@gmail.com](mailto:rianrosita8@gmail.com)

**Abstract :** This research is directed to two main things namely, (1) factors that influence the occurrence of underage marriage in the village of Muncang. (2) the legal awareness of the community about underage marriage to children's education right. The results showed that the factors affecting underage marriages were economic problems, there had been a soulmate, and fears of the parents would be undesirable. Regarding public awareness of the law can be said that society is not aware of the law especially for those who do underage marriages. This is because public awareness is limited to the knowledge of the understanding of underage marriages. The conclusion of the study is the legal awareness of Kampung Muncang community regarding the prohibition of underage marriage to the right of children's education can be said to be not aware of the law because only knowing about the notion of marriage under Without knowing the rules governing it. Then the relation to obtaining the right of education is, if they do the marriage before the specified age limit means they have not been able to get the maximum education they can.

**Keywords:** *Chiildren's education right, Legal Awareness, Community, and Underage Marriage*

**Abstrak:** Penelitian ini diarahkan kepada dua hal pokok yaitu, (1) Faktor Penyebab pernikahan di bawah umur. (2) kesadaran hukum masyarakat mengenai larangan pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur diantaranya adalah masalah ekonomi, sudah ada jodohnya, dan ketakutan orangtua akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat dikatakan bahwa masyarakat belum sadar hukum terutama bagi mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur. Hal ini karena kesadaran masyarakat hanya sebatas pada pengetahuan mengenai pengertian dari pernikahan di bawah umur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesadaran hukum masyarakat Kampung Muncang mengenai larangan pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak dapat dikatakan belum sadar hukum karena hanya mengetahui mengenai pengertian dari pernikahan di bawah umur tanpa mengetahui peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Kemudian kaitannya dengan mendapatkan hak pendidikan adalah, jika mereka melakukan pernikahan sebelum batas umur yang ditetapkan artinya mereka belum bisa mendapatkan pendidikan secara maksimal yang mereka bisa.

**Kata Kunci:** Hak Pendidikan Anak, Kesadaran Hukum, Masyarakat, dan Pernikahan di Bawah Umur

*Rian Rosita:*  
*Hak Pendidikan Anak dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai*  
*Larangan Pernikahan di Bawah Umur*

## **I. PENDAHULUAN**

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa, siap secara lahir dan batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah rumah tangga.<sup>1</sup> Menurut Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika mengikuti aturan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan anak, pernikahan anak jelas menyalahi Undang-undang tersebut.

Di Indonesia, pelaksanaan pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi. Seperti kasus pernikahan seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dengan seorang pemuda berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang terjadi di Sulawesi Selatan pada bulan Mei 2018 lalu. Kasus tersebut memperpanjang daftar pernikahan anak yang terungkap ke publik.<sup>2</sup>

Untuk wilayah Jawa Barat, menurut laporan dari Badan Pusat Statistik tahun 2017, kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur memiliki jumlah yang cukup tinggi yaitu sebesar 27, 02 %. Laporan BPS dan UNICEF mencatat untuk wilayah Jawa Barat, kabupaten yang memiliki jumlah pernikahan anak yang tinggi adalah Kabupaten Cianjur dengan jumlah 22 % anak perempuan yang sudah menikah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari ketua RT yang ada di Kampung Muncang Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin yang terdiri dari 4 RT, pada tahun 2016 terdapat 10 pernikahan anak perempuan yang menikah pada usia di bawah 16 tahun dari total 36 anak perempuan. Dan pada tahun 2017, mengalami penurunan menjadi 8 pernikahan anak perempuan di bawah 16 tahun yang menikah dari total 30 anak perempuan di bawah 16 tahun. Kemudian anak perempuan yang menikah di bawah 16 tahun pada tahun 2018 sebanyak 16 anak dari total 33 anak perempuan berusia di bawah 16 tahun yang ada di Kampung Muncang. Ini menunjukkan bahwa sebanyak 48 % dari jumlah anak perempuan di

*Rian Rosita:  
Hak Pendidikan Anak dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai  
Larangan Pernikahan di Bawah Umur*

Kampung Muncang telah menikah di bawah umur pada tahun 2018 lalu. Adapun usia anak perempuan yang menikah diantaranya usia 15 tahun sebanyak 10 orang, usia 14 tahun sebanyak 3 orang, dan usia 13 tahun sebanyak 3 orang.

Adanya pernikahan di bawah umur tentunya memiliki dampak atau pengaruh terhadap hak-hak anak, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, dan anak yang menikah di bawah usia 16 tahun tersebut juga tidak memenuhi kewajibannya dalam pendidikan yaitu wajib belajar 12 tahun, karena pada usia tersebut seharusnya anak masih duduk di bangku sekolah. Hampir bisa dipastikan bahwa anak yang menikah akan putus sekolah sehingga wajib belajar 12 tahun tidak terpenuhi. Pelaksanaan pernikahan di bawah umur memiliki dampak yang cukup besar pada tingkat partisipasi pendidikan anak perempuan. Padahal anak merupakan aset bangsa, pendidikan juga merupakan aset bangsa namun dalam pengertian yang lain pendidikan yang berkualitas akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Sama halnya dengan anak, semakin baik kualitas anak akan membawa sebuah bangsa semakin maju.

Berdasarkan data yang diperoleh, dari total 16 anak perempuan yang menikah di bawah usia 16 tahun di Kp. Muncang pada tahun 2018, 15 orang diantaranya sedang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebelum menikah, sedangkan 1 orang sudah putus sekolah pada saat Sekolah Dasar (SD) sebelum melaksanakan pernikahan. Setelah menikah dari 15 anak tersebut tidak ada lagi yang melanjutkan pendidikannya. Ini menunjukkan bahwa adanya pernikahan di bawah umur memberikan dampak pada pendidikan anak.

Fokus dari penelitian ini adalah Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Larangan Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Anak Untuk membatasi, maka penelitian ini fokus pada anak perempuan yang akan mengkaji dua hal, *pertama* faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan perempuan di bawah umur di Kp. Muncang Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. *Kedua*, Bagaimana kesadaran hukum masyarakat mengenai larangan pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak perempuan di Kp. Muncang Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

## II. PEMBAHASAN

### A. Faktor pernikahan anak perempuan di Kp. Muncang Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

Pengertian pernikahan di bawah umur menurut Riyadi dalam Siti Zubaidah adalah suatu ikatan perkawinan yang belum memenuhi persyaratan suatu perkawinan menurut pemerintah. Usia ini dianggap masih emosi seseorang.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang sudah ditentukan, sehingga dapat menimbulkan masalah atau dampak-dampak yang tidak diinginkan.

Secara umum, faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dikalangan masyarakat menurut Hariati<sup>5</sup> adalah *pertama*, Faktor sosial budaya; beberapa daerah di Indonesia masih banyak yang beranggapan bahwa anak perempuan yang terlambat melakukan pernikahan merupakan aib untuk keluarga, sehingga mereka lebih memilih untuk menerapkan pernikahan di bawah umur. *Kedua*, faktor ekonomi; Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya dinikahkan sehingga dianggap mampu meringankan beban keluarga. *Ketiga*, Media massa; Gencarnya ekspos seks di media massa menyebabkan remaja modern permisif terhadap seks. Berikutnya adalah faktor agama; Dari sudut pandang agama menikah di usia muda tidak ada pelanggaran bahkan dianggap lebih baik daripada melakukan perzinahan. Selanjutnya Pandangan dan kepercayaan; Banyak di daerah ditemukan pandangan dan kepercayaan yang salah misalnya kedewasaan dinilai dari status perkawinan, status janda dianggap lebih baik daripada perawan tua, dan yang terakhir Faktor orang tua; Orang tua merasa khawatir akan dampak yang dapat ditimbulkan karena

*Rian Rosita:*  
*Hak Pendidikan Anak dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai*  
*Larangan Pernikahan di Bawah Umur*

anak perempuannya yang berpacaran dengan laki-laki terlalu dekat sehingga memilih untuk segera menikahkan anaknya.

Pernikahan anak perempuan di Kp. Muncang Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor berdasarkan temuan di lapangan, maka terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur, antara lain:

1. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan permasalahan yang umum terjadi di Indonesia, dimana masih banyak keluarga-keluarga pada masyarakat yang memiliki masalah dalam perekonomian. Karena permasalahan ekonomi ini lah yang menyebabkan banyak orang tua yang merelakan anaknya untuk menikah meskipun pada usia di bawah umur dimana anak tersebut seharusnya mendapatkan hak pendidikan yang layak.

Masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga menjadi faktor utama bagi orangtua untuk menikahkan anaknya di usia yang masih di bawah umur atau belum cukup untuk melakukan pernikahan. Mereka tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur terhadap anaknya khususnya hak pendidikan anaknya.

2. Sudah Ada Jodohnya

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kampung Muncang adalah karena sudah ada jodohnya.

Kebanyakan dari masyarakat di Kampung Muncang khususnya yang melakukan pernikahan di bawah umur baik orangtua maupun anaknya, beranggapan bahwa jika sudah ada jodohnya untuk apalagi menunda pernikahan, menurut mereka karena sudah ada jodohnya dibandingkan harus pacaran yang lama tetapi akhirnya tidak menikah, lebih jika sudah ada yang ingin menikahi anaknya maka dinikahkan saja meskipun usianya masih di bawah umur.

Dari beberapa informan yang sudah di wawancarai pada penelitian ini, salah satu faktornya adalah karena sudah ada jodohnya.

3. Ketakutan Orangtua Terhadap Hal yang Tidak Diinginkan

*Rian Rosita:  
Hak Pendidikan Anak dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai  
Larangan Pernikahan di Bawah Umur*

Faktor terakhir yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kampung Muncang adalah karena adanya ketakutan orangtua terhadap hal yang tidak diinginkan.

Pada zaman sekarang, pergaulan anak-anak dapat dikatakan semakin bebas, keadaan inilah yang membuat orangtua dari anak yang menikah di bawah umur merasa ketakutan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak mereka, karena mereka beranggapan bahwa lebih baik menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur dibandingkan dengan membiarkan anaknya hanya berpacaran kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari beberapa informan yang sudah di wawancarai pada penelitian ini, salah satu faktornya adalah karena ketakutan orangtua terhadap hal yang tidak diinginkan. Beberapa informan mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur karena ketakutan orangtua terhadap hal yang tidak diinginkan sehingga orangtua lebih memilih untuk menikahkan anaknya meskipun usianya masih di bawah umur.

Selain ketiga faktor tersebut, *Expert* yaitu Ibu Susianah, M.Si memberi tanggapan bahwa faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu salah satunya adalah hamil diluar nikah. Tetapi jika di daerah biasanya faktor yang mempengaruhinya adalah tradisi budaya. Artinya, anak yang baru lahir sudah dijodohkan.

Menurut Hariati, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur pada masyarakat antara lain adalah faktor ekonomi, faktor orangtua, faktor sosial budaya, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, agama, pandangan dan kepercayaan. Pada masyarakat Kampung Muncang dari ke 7 faktor yang dikemukakan oleh Hariati, terdapat 2 faktor yang sesuai dengan apa yang dikemukakan olehnya yaitu masalah ekonomi dan ketakutan orangtua yang termasuk dalam faktor orangtua. Untuk faktor lainnya yang dikemukakan oleh Hariati pada masyarakat Kampung Muncang tidak mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur. Contohnya adalah faktor sosial budaya, pada masyarakat Kampung Muncang faktor sosial budaya tidak berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan di bawah umur, karena pernikahan di bawah umur yang

*Rian Rosita:*

*Hak Pendidikan Anak dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Larangan Pernikahan di Bawah Umur*

terjadi di Kampung Muncang bukan karena adanya anggapan bahwa anak perempuan yang terlambat melakukan pernikahan merupakan aib untuk keluarga, sehingga mereka lebih memilih untuk menerapkan pernikahan di bawah umur.

**B. Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Larangan Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Anak Perempuan Di Kp. Muncang Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor**

Menurut Soemardjan dalam Soekanto mengemukakan bahwa masyarakat yaitu orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.<sup>6</sup> Dari pengertian masyarakat menurut ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama-sama dan membentuk suatu sistem kebiasaan, dimana interaksi yang ada di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut.

Dalam hukum Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB yaitu Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*). Dalam Konvensi tersebut menyebutkan bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh anak adalah hak atas pendidikan.

Selain dalam konvensi hak-hak anak, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.<sup>7</sup>

Selama melakukan penelitian, peneliti juga menemukan bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kampung Muncang mengenai larangan pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak. Seperti yang dikatakan oleh Sudikmo bahwa kesadaran merupakan kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada, diharapkan dan bagaimana seharusnya manusia

*Rian Rosita:  
Hak Pendidikan Anak dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai  
Larangan Pernikahan di Bawah Umur*

berperilaku dan bertindak sesuai dengan hukum. Adapun pengertian kesadaran hukum menurut Arliman mengemukakan bahwa Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.<sup>8</sup>

Menurut Soekanto dalam Arliman ada empat indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan tingkat kesadaran hukum masyarakat, antara lain adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.<sup>9</sup>

Mengenai kesadaran hukum, peneliti berpedoman pada indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soekanto yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum serta pedoman penelitian yang telah peneliti buat sebelumnya.

#### 1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan merupakan indikator yang pertama dalam kesadaran hukum, yang dimaksud dengan pengetahuan dalam kesadaran hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekanto adalah masyarakat memiliki pengetahuan secara konseptual bahwa suatu perbuatan telah ada yang mengaturnya.

Jika dilihat dari sisi pengetahuan, masyarakat khususnya yang melakukan pernikahan di bawah umur sudah ada beberapa anak yang memiliki pengetahuan mengenai pernikahan di bawah umur yang mempengaruhi hak pendidikannya meskipun hanya sebatas pengertian dari pernikahan di bawah umur saja. Akan tetapi pengetahuan yang dimilikinya ibarat buah, yaitu hanya sebatas kulitnya saja. Mereka tidak mengetahui peraturan mengenai pernikahan khususnya batas usia pernikahan dan peraturan mengenai hak pendidikan anak mereka tidak mengetahuinya. Begitupula orangtua dari anak yang melakukan pernikahan di bawah umur kebanyakan dari mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan di bawah umur dan pendidikan.

#### 2. Pemahaman Hukum

Indikator yang kedua untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat yaitu pemahaman hukum. Dengan adanya pemahaman hukum ini, masyarakat mulai menghayati isi aturan-aturan yang mengaturnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan masyarakat juga mulai memahami



*Rian Rosita:*  
*Hak Pendidikan Anak dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai*  
*Larangan Pernikahan di Bawah Umur*

tentang tujuan dari adanya hukum. Dengan adanya pemahaman hukum maka akan timbul sikap hukum. Seperti yang dikatakan oleh Soekanto bahwa pemahaman dalam kesadaran hukum berarti orang tersebut mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu.

Dari hasil temuan di lapangan, masyarakat khususnya yang melakukan pernikahan di bawah umur kurang memahami mengenai peraturan mengenai pernikahan khususnya batas usia yang diatur dalam undang-undang. Pemahaman masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak hanya sebatas pada pemahaman mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak.

### 3. Sikap Hukum

Indikator ketiga untuk mengetahui kesadaran hukum yaitu dengan melihat sikap yang dimiliki masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak. Sikap hukum ini seperti yang dikatakan oleh Soekanto bahwa sikap merupakan suatu kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hukum karena seseorang mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam penelitian ini peneliti melihat bagaimana sikap masyarakat terhadap peraturan tentang pernikahan di bawah umur dan pendidikan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat kurang memiliki sikap yang mendukung mengenai pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak. Walaupun beberapa informan mengatakan bahwa pernikahan di bawah umur itu tidak baik, akan tetapi tidak didukung dengan sikap untuk mencegahnya, khususnya bagi mereka yang sudah melakukan pernikahan di bawah umur, baik orangtua maupun anaknya.

Masyarakat menganggap pernikahan di bawah umur itu sebenarnya tidak baik, tetapi menurut mereka jika sudah ada jodohnya dan sudah takdirnya untuk cepat menikah mau bagaimana lagi. Terbukti dengan masih banyaknya anak perempuan yang menikah di bawah umur di Kampung Muncang. Sikap dari masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak juga bisa dilihat dari banyaknya anak perempuan yang menikah di bawah umur

*Rian Rosita:*

*Hak Pendidikan Anak dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Larangan Pernikahan di Bawah Umur*

tidak melanjutkan lagi sekolahnya setelah menikah. Dikarenakan kebanyakan dari mereka berfikir bahwa jika sudah menikah untuk apalagi melanjutkan sekolah.

#### 4. Perilaku Hukum

Indikator terakhir untuk menunjukkan kesadaran hukum masyarakat yaitu perilaku hukum. Perilaku hukum dapat diketahui ketika masyarakat sudah lebih banyak melakukan apa yang diatur oleh undang-undang karena perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu peraturan dalam kehidupan masyarakat, dan seperti yang dikatakan oleh Soekanto bahwa perilaku hukum merupakan seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Seperti masyarakat tidak lagi melakukan pernikahan di bawah umur karena hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang pernikahan dan undang-undang perlindungan anak.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan masih banyak masyarakat yang berperilaku tidak sesuai hukum khususnya yang melakukan pernikahan di bawah umur, karena di Kampung Muncang ini masyarakat masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur. Begitupula terhadap anak mereka nanti, kebanyakan dari mereka berfikir bahwa lihat saja kondisinya nanti, jadi mereka tidak masalah jika anaknya nanti menikah di bawah umur juga.

### III. PENUTUP

Penelitian yang dilakukan di Kampung Muncang ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kampung Muncang ada 3 (tiga) yaitu : masalah ekonomi, sudah ada jodohnya, dan ketakutan orangtua terhadap hal yang tidak diinginkan. Mengenai kesadaran hukum masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak di Kampung Muncang dapat dikatakan masih belum sadar akan hukum untuk tidak melakukan pernikahan di bawah umur. Hal ini karena masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pernikahan di bawah umur khususnya batas usia yang diperbolehkan dalam undang-undang. Dalam konstruksi hukum memang dimungkinkan mereka untuk melakukan pernikahan di bawah umur jika mendapatkan persetujuan orangtuanya

*Rian Rosita:*  
*Hak Pendidikan Anak dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai*  
*Larangan Pernikahan di Bawah Umur*

dan mendapatkan penetapan pengadilan, namun kaitannya dengan mendapatkan hak pendidikan adalah, jika mereka melakukan pernikahan sebelum batas umur yang ditetapkan artinya mereka belum bisa mendapatkan pendidikan secara maksimal yang mereka bisa.

### **Catatan Akhir**

<sup>1</sup> Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban keluarga.<sup>1</sup> Jika suami istri memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati. Dengan demikian, tujuan terbentuknya keluarga akan terwujud yang sesuai dengan tuntunan Agama, yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Aris, A., Budiman, B., & Zulkifli, Z. (2017). EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEMBERI PEMAHAMAN KONSEP KELUARGA SAKINAH. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 206-217.

<sup>2</sup>[www.idntimes.com/news/indonesia/amp/margith-juita-damanik/3-kasus-pernikahan-anak-di-2018-yang-bikin-heboh](http://www.idntimes.com/news/indonesia/amp/margith-juita-damanik/3-kasus-pernikahan-anak-di-2018-yang-bikin-heboh)

<sup>3</sup>Siti Zubaidah H. (2014). *Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal terhadap Terjadinya Pernikahan Usia Muda Pada Remaja Di Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang*. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara:Medan, h.12.

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

<sup>5</sup>Hariati. (2017). *Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pembatasan Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*.Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 1 No 2, h. 168-169.

<sup>6</sup> Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Rajawali Pers., 2017), H. 21.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

<sup>8</sup>Arliman L. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. (Yogyakarta: Deepublish, 2015)., h. 220.

<sup>9</sup> Arliman L. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, h. 227-228.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Rian Rosita:

*Hak Pendidikan Anak dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Larangan Pernikahan di Bawah Umur*

- Arliman L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aris, A., Budiman, B., & Zulkifli, Z. (2017). EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEMBERI PEMAHAMAN KONSEP KELUARGA SAKINAH. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 206-217.
- Basrowi & Suwandi (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Hariati. (2017). *Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pembatasan Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*. Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 1 No 2. 157-172.
- Margith. 2018. *3 Kasus Pernikahan Anak di 2018 yang Bikin Heboh*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/amp/margith-juita-damanik/3-kasus-pernikahan-anak-di-2018-yang-bikin-heboh>. Di akses pada 25 Desember 2018 Pukul 14.30
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Siti Zubaidah H. (2014). *Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal terhadap Terjadinya Pernikahan Usia Muda Pada Remaja Di Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang*. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara:Medan.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.